

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2014)

INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND AND SPECIAL ALLOCATION FUND TO FINANCIAL SELF SUFFICIENCY LEVEL

(STUDIES ON REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA PROVINCE DURING 2010-2014)

¹Dian Budi Susanti, ²Sri Rahayu, ³Siska P. Yudowati

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

^{2,3}P Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

e-mail: ¹dianbudi8963@gmail.com, ²sriahayu@yahoo.co.id, ³siskayudowati@yahoo.com

Abstrak

Cara mengukur kinerja suatu wilayah dalam bidang keuangan digunakan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki fenomena dimana pendapatan asli daerah meningkat namun Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menurun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014, serta mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model (REM)* dengan waktu penelitian tahun 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 kabupaten/kota. Dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 26 kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata kunci: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.

Abstract

How to measure the performance of a region in the sector of finance used Financial Self Sufficiency Level. Financial Self Sufficiency Level indicated by the large size of the Local Government Revenue than regional income derived from other sources. Some areas in West Java province have the phenomenon when Local Government Revenue are increasing but Financial Self Sufficiency Level decreases.

The purpose of this study is to determine how much Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Financial Self Sufficiency Level in the Districts / Cities of West Java province during 2010-2014, and influence of Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund to Financial Self Sufficiency Level either simultaneously or partially.

The method used in this research is panel data regression using Random Effect Model (REM) by the time of the study in 2010-2014. Total population in this study as many as 27 districts / cities. By using purposive sampling obtained a sample of 26 districts / cities.

The results of this study indicate that Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, jointly affect the level of Financial Self Sufficiency Level. Partially, Local Government Revenue positive effect on Financial Self Sufficiency Level, General Allocation Fund positive effect on Financial Self Sufficiency Level, while the Special Allocation Fund has no effect Financial Self Sufficiency Level.

Keywords: *Financial Self Sufficiency Level; Local Government Revenue; General Allocation Fund; Special Allocation Fund.*

1. Pendahuluan

Pelaksanaan kebijakan di Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014^[8] tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (Imawan,dkk 2014)^[3].

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014^[8] tentang Pemerintah Daerah, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 rata-rata 27%, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori dan pola hubungan dengan pemerintah konsultatif karena berada di presentase 25-50%. Hal ini berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan masih ada campur tangan dari pemerintah. Daerah tersebut dianggap sedikit mampu untuk melaksanakan otonomi daerah pola hubungan konsultatif dan menunjukkan total penerimaan daerah masih rendah dan tingkat keterhantunagn terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah antara lain adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah (Ersyad, 2011)^[1]. Pada variabel pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Fenomena yang terjadi di Kota Bandung adalah ketika kontribusi pendapatan asli daerah meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya menurun pada tahun 2011-2012. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bogor adalah ketika kontribusi pendapatan asli daerah menurun, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya meningkat pada tahun 2011-2012. Selain itu, penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Reza (2013)^[5] menghasilkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan Virgi (2013)^[6] menghasilkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah adalah dana alokasi umum. Jika dana alokasi umum meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun, (Reza, 2013)^[5]. Pada variabel dana alokasi umum dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kota Tasik dan Kota Depok. Fenomena yang terjadi di Kota Tasik dan Kota Depok adalah ketika kontribusi dana alokasi umum meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerahnya menjadi menurun pada tahun 2011-2012. Penelitian yang dilakukan Muliana (2009)^[4] menghasilkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian yang dilakukan Reza (2013)^[5] menghasilkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel ketiga adalah dana alokasi khusus. Jika dana alokasi khusus meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun, (Reza, 2013)^[5]. Pada variabel dana alokasi khusus dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kota Bandung dan Kota Depok. Fenomena yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2012-2013 kontribusi dana alokasi khusus meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga meningkat. Fenomena yang terjadi di Kota Depok adalah pada tahun 2013-2014 dana alokasi khusus meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya meningkat. Penelitian yang dilakukan Muliana (2009)^[4] menghasilkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan Ersyad (2011)^[1] menghasilkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014, serta mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah baik secara simultan maupun parsial.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 130 data observasi yang terdiri dari 26 kabupten/kota dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan *random effect model*.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Menurut Halim (2011:232)^[2] Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004^[4] tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Reza, 2013)^[5] Jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Dengan demikian, jika pendapatan asli daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004^[7] tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Muliana (2009)^[4], Jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut. Jadi, semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Pengukuran Dana Alokasi Umum dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Alokasi Umum dengan Total Pendapatan Daerah.

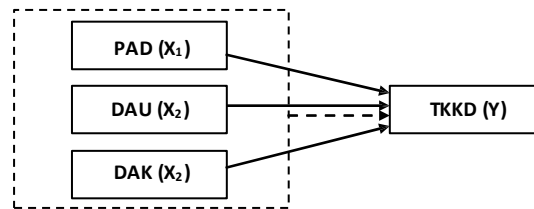
$$\frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004^[7] tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Menurut (Reza, 2013)^[5] Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika dana alokasi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Jadi, jika dana alokasi khusus yang diterima suatu daerah meningkat, maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tersebut menurun. Pengukuran Dana Alokasi Khusus dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Alokasi Khusus dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\frac{\text{DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



Keterangan: —————> Secara parsial
 - - - - -> Secara simultan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh 130 data observasi yang terdiri dari 26 kabupten/kota dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan *random effect model*.

3. Pembahasan

Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Uji Fixed Effect (Uji Chow)

Tabel 1. Hasil Uji Fixed Effect

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.632440	(25,101)	0.0464
Cross-section Chi-square	44.118701	25	0.0105

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas *cross section Chi-square* sebesar 0.0105 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan nilai prob *cross section F* sebesar 0,000.0464 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka H_1 diterima atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan pengujian antara metode *fixed effect* dengan *random effect* menggunakan uji Hausman.

Uji Random Effect (Uji Hausman)

Tabel 2. Hasil Uji Random Effect

Test cross-section random effects			
Chi-Sq.			
Test Summary	Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.437404	3	0.0922

Sumber. Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0.0922 > 0.05, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_1 ditolak yaitu regresi data panel menggunakan metode *random effect*. Maka metode yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah metode *random effect*.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

Weighted Statistics			
R-squared	0.882155	Mean dependent var	26.77943
Adjusted R-squared	0.849485	S.D. dependent var	20.90585
S.E. of regression	8.110688	Akaike info criterion	7.217982
Sum squared resid	6644.109	Schwarz criterion	7.857663
Log likelihood	-440.1688	Hannan-Quinn criter.	7.477906
F-statistic	27.00205	Durbin-Watson stat	1.965330
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Eviews 8.0 (data diolah)

Berdasarkan pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai probabilitas Uji F sebesar 0,00000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas Uji F lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,00000 < 0,05$, maka H_1 diterima. Hal ini berarti PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap TKKD.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.05657	6.167464	2.117008	0.0367
PAD	1.812851	0.166572	10.88330	0.0000
DAU	-0.265514	0.105178	-2.524417	0.0131
DAK	0.079206	0.320888	0.246835	0.8055

Sumber : Eviews 8.0 (data diolah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel PAD (X_1) memiliki nilai probabilitas 0.0000. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,0000 < 0,05$). Sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_{a2} diterima yang berarti PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan TKKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara parsial karena perubahan PAD mengakibatkan perubahan pada TKKD.
2. Variabel DAU (X_2) memiliki nilai probabilitas 0.0131. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,0131 < 0,05$). Sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_{a3} diterima yang berarti DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan TKKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara parsial karena perubahan DAU mengakibatkan perubahan pada TKKD.
3. Variabel DAK (X_3) memiliki nilai probabilitas 0.8055. Artinya nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi ($0,8055 > 0,05$). Sesuai ketentuan pengambilan keputusan maka H_{04} diterima yang berarti DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan TKKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara parsial karena perubahan DAK belum tentu mengakibatkan perubahan pada TKKD.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan diketahui bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap TKKD sebesar 84,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK menjelaskan variabel TKKD.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, PAD memiliki nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap TKKD. Dengan nilai koefisien 1,812851 dapat disimpulkan bahwa variabel PAD mempunyai hubungan yang positif. Hasil tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar PAD, maka TKKD akan semakin meningkat atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan hasil statistik deskriptif, PAD yang di atas rata-rata sebesar 40,77% dan di bawah rata-rata sebesar 59,23%. Dari 40,77% data PAD yang berada di atas rata-rata, jumlah TKKD yang di atas rata-rata sebesar 30% dan TKKD yang di bawah rata-rata sebesar 10,77%. Sedangkan Dari 59,23% data PAD yang berada di bawah rata-rata, jumlah TKKD yang di atas rata-rata

sebesar 9,23% dan TKKD yang dibawah rata-rata sebesar 50,00% . Dapat dilihat bahwa dari 130 data terdapat 30% data yang menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat maka TKKD akan meningkat dan terdapat 50% data yang menunjukkan bahwa apabila PAD menurun, maka Kinerja Keuangan pun akan menurun. Hal ini menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan kerangka teori bahwa semakin besar PAD maka TKKD semakin meningkat dan ketika PAD kecil TKKD akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) ^[4] yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan TKKD.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, DAU memiliki nilai probabilitas 0.0131 < 0.05, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H₀ ditolak yang dapat diartikan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap TKKD. Dengan nilai koefisien -0.265514 dapat disimpulkan bahwa variable PAD mempunyai hubungan yang negatif. Hasil tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar DAU, maka TKKD akan semakin menurun atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan hasil statistik deskriptif, DAU yang diatas rata-rata sebesar 66,92% dan dibawah rata-rata sebesar 33,02% . Dari 66,92% data DAU yang berada diatas rata-rata, jumlah TKKD yang diatas rata-rata sebesar 16,92% dan TKKD yang dibawah rata-rata berjumlah 50,00% . Sedangkan Dari 33,02% data DAU yang berada dibawah rata-rata, jumlah TKKD yang diatas rata-rata sebesar 22,31% dan TKKD yang dibawah rata-rata sebesar 10,77% . Dapat dilihat bahwa dari 130 data terdapat 50,00% data yang menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat maka TKKD akan menurun dan terdapat 22,31% data yang menunjukkan bahwa apabila DAU menurun, maka TKKD pun akan meningkat. Hal ini menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan kerangka teori bahwa semakin besar DAU maka TKKD semakin menurun dan ketika DAU menurun maka TKKD akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2013) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi negatif antara DAU dengan TKKD.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, DAK memiliki nilai probabilitas 0,8055 < 0.05, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H₀ diterima yang dapat diartikan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap TKKD. Dengan nilai koefisien 0.079206 dapat disimpulkan bahwa variable PAD mempunyai hubungan yang positif. Hasil tersebut tidak sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar DAK, maka TKKD akan semakin menurun atau sebaliknya.

Hal ini berkaitan dengan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan hasil statistik deskriptif, DAK yang dibawah rata-rata berjumlah 50,00%. Dari 50,00% data DAK yang berada bawah rata-rata, jumlah TKKD yang diatas rata-rata sebesar 23,08% dan jumlah TKKD yang bawah rata-rata sebesar 26,92%. Dapat dilihat bahwa dari 130 data terdapat 23,08% data yang menunjukkan bahwa apabila DAK menurun maka TKKD akan meningkat dan terdapat 26,92% data yang menunjukkan bahwa apabila DAK menurun, maka TKKD akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa DAK cenderung berada dibawah rata-rata dengan TKKD dibawah rata-rata, yang berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar belum menggunakan DAK dengan efektif.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK diarahkan untuk pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana fisik masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap TKKD. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menggunakan dana alokasi khusus karena penggunaan dana alokasi khusus tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran DAK di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak dialokasikan untuk Belanja Modal yang bertujuan untuk meningkatkan TKKD, melainkan dialokasikan untuk belanja lain, seperti belanja barang dan jasa. Sehingga DAK yang tinggi belum tentu mengakibatkan TKKD yang rendah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. DAK tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Daftar Pustaka:

- [1] Eryad, Muhammad. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). Skripsi. FE UNP :Padang
- [2] Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Imawan, dan Agus. (2014) . Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765. 147-155.
- [4] Muliana. (2009). *Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi USU. Medan: tidak diterbitkan.
- [5] Reza Mariska. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hail, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat 2006-2011*. *Jurnal perspektif dan pembangunan daerah*. Vol. 1 No. 2. ISSN: 1979 – 7338. (Juli, 2013).
- [6] Virgi, Septyas. (2014). *Pengaruh Dana Lokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tax Effort dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur*. *Jurnal EMBA*, vol 1, No.1. 1189-1197.
- [7] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- [8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

